

Tudingan Mafia Anggaran Pemprov Dibantah

PONTIANAK—Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Kartius, membantah adanya praktik mafia anggaran di pemerintah provinsi. Karena itu, kekawatiran adanya praktik tersebut dinilai tidak beralasan. "Tidak ada itu kalau di pemerintah

provinsi. APBD kita kecil, mana mau sempat di-mafia," katanya saat ditemui usai rapat gabungan pembahasan anggaran perubahan 2011 di DPRD, Kamis (6/10). Menurut Kartius, selama ini

kalangan eksekutif dan legislatif dipemprov tidak berani berbuat yang macam-macam, apalagi sampai melakukan praktik mafia dalam pembahasan anggaran.

Total APBD Provinsi Kalbar adalah senilai Rp1,8 triliun hingga sekitar Rp2 triliun. Jumlah tersebut dipandang relatif kecil sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai sasaran mafia anggaran. "Ndak ada itu. Kita transparan, terbuka. Tidak ada

orang yang mau *nitip, markup*, manipulasi. Kita di eksekutif tidak berani. Kawan-kawan di legislatif juga tidak berani. Rasa-rasanya untuk Kalbar tidak adalah mafia anggaran," tegasnya. Seperti diketahui, isu

• ke halaman 15 kolom 1

METRO
HARI INI



Tudingan Mafia Anggaran Pemprov Dibantah

Sambungan dari halaman 9

tentang mafia anggaran di tubuh DPR RI (Badan Anggaran) santer diberitakan oleh sejumlah media massa.

Beberapa hari lalu, aktivis mahasiswa Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) juga melakukan aksi di Gedung DPRD. Dalam aspirasinya, mereka antara lain menuntut penegak hukum membongkar mafia anggaran

yang diduga terjadi pula di Pemprov Kalbar.

Aksi para mahasiswa ini menyusul hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan pemprov 2010. BPK RI antara lain menemukan adanya kejanggalan pada aset dan munculnya anggaran siluman. Jumlah kebocoran mencapai Rp156 miliar dan terdapat temuan nilai aset yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Menurut Kartius, demo-demo yang seperti itu cenderung

berlandaskan pada temuan BPK. Temuan BPK tersebut dinilai tidak otomatis mengindikasikan adanya praktik mafia anggaran atau korupsi.

"Itu kan belum action plan. Kita diberikan waktu 60 hari untuk menjawab. Kalau setelah 60 hari kita jawab, dinyatakan tidak sesuai dokumen, baru dianggap berupa kerugian negara sehingga bisa dilimpahkan ke kejaksaan tinggi. Jadi, itu belum! Mungkin temuan itu karena SPj-nya belum lengkap, SPj

masih naik di pimpinan atau masih proses sehingga saat pemeriksaan, barang itu belum ada. Temuan BPK itu biasanya menyangkut masalah administrasi dan dokumen," jelasnya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar Suprianto, juga menegaskan bahwa di DPRD Kalbar tidak terdapat adanya praktik mafia anggaran. "Isu di DPR RI jangan dibawa-bawa ke sini. Di sini tidak ada yang seperti itu," ujar dia. (ron)